

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan pemerintah di bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (PLSP) tahun 2001–2005 bertumpu pada empat masalah klasik, yaitu pemerataan, mutu, relevansi, dan efisiensi (Jalal, 2001: 2-3). Menurut Supriyono (2000: 1) telah banyak model program pendidikan dikembangkan dan diaplikasikan untuk memecahkan masalah klasik tersebut, baik yang bersifat parsial maupun yang bersifat menyeluruh, tetapi kenyataannya masalah tersebut belum juga dapat teratasi.

Masalah pemerataan, mutu, dan relevansi pendidikan menarik untuk ditelusuri lebih jauh. Pada aspek pemerataan, pemerintah sejak tahun 1986 telah melaksanakan Wajib Belajar Sekolah Dasar 6 Tahun. Tahun 1994 ditingkatkan menjadi Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Meskipun demikian, hingga saat ini belum semua anak usia wajib belajar dapat tertampung di sekolah. Informasi Balitbang Diknas mengungkapkan bahwa tahun 2006 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI baru mencapai 94,7% dan putus SD/MI tercatat 846,6 ribu anak. Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP/MTs tercatat baru 88,7%, dan putus sekolah tercatat 174,4 ribu anak. Sementara pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) termasuk Paket C APK hanya 56,2% dan putus sekolah 178,6 ribu anak. Pada tahun yang sama, dari total lulusan SD/MI yang mencapai 4.072.508 anak, sebanyak 322,2 ribu anak tidak dapat melanjutkan ke jenjang SMP/MTs. Masalah putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan pendidikan merupakan persoalan serius yang dapat mempengaruhi keberhasilan penuntasan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Bappenas, 2006).

Ditinjau dari segi mutu, pendidikan mempunyai peran penting dalam peningkatan mutu sumber daya manusia. Data *United Nations Development Programs* (UNDP) tahun 2006 mengungkapkan bahwa *Human Development Index* (HDI) Indonesia sangat rendah. Indonesia berada pada peringkat 108 dari 177 negara yang diteliti. Negara Asean lainnya seperti Brunai Darussalam, Malaysia, Thailand, Filipina masing-masing telah berada pada posisi 34, 61, 74, dan 84. Dalam hal penguasaan pelajaran IPA, siswa Indonesia berada di peringkat ke-32 dan pelajaran matematikanya berada pada peringkat ke-34 dari 38 negara yang diteliti. Hal ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan kita sangat jauh di bawah negara-negara berkembang apalagi negara maju.

Selain masalah pemerataan dan mutu, masalah relevansi pendidikan dengan dunia kerja juga patut mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Selama ini kemiskinan dan pengangguran banyak dihubungkan dengan ketidakberdayaan pendidikan atau tidak relevannya *output* pendidikan dengan lapangan kerja (Soedomo, 1993). Data penduduk miskin Indonesia pada bulan Maret tahun 2006 sebesar 39,3 juta orang atau 17,75 persen dari jumlah penduduk Indonesia (*Tempo*interaktif.com, 2-9-2006). Adapun pencari kerja atau pengangguran menurut BPS tahun 2007 sebesar 10.547.917 orang, dan struktur tenaga kerja Indonesia yang berpendidikan SMP ke bawah mencapai 6.062.676 orang atau 57,48% (BPS, 2007).

Di sisi lain data Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengungkapkan bahwa setiap tahun terjadi penambahan angkatan kerja baru sekitar 2,5 juta orang. Jumlah yang terserap di sektor formal dan informal rata-rata hanya sekitar 20-30% (Depnakertrans, 2004b). Rendahnya persentase daya serap tersebut bukan semata-mata disebabkan sempitnya

lapangan kerja, melainkan kualifikasi yang diinginkan oleh lembaga pencari tenaga kerja tidak terpenuhi oleh pencari kerja. Informasi ini memberikan petunjuk bahwa masyarakat sangat memerlukan pendidikan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha/industri, guna dijadikan bekal memasuki persaingan lapangan kerja atau usaha mandiri.

Kenyataan tersebut menimbulkan berbagai efek dan eksekusi yang saling berangkai yang dimulai dari banyaknya anak putus sekolah dan atau yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Hal demikian menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya tenaga kerja yang berdampak pada meningkatnya pengangguran. Pengangguran menyebabkan kemiskinan dan mendorong peningkatan masalah sosial dan kriminal seperti kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, pencurian, perampokan, dan berbagai penyakit sosial lainnya. Efek jangka panjangnya adalah pemborosan sumber daya, menjadi beban keluarga dan masyarakat, serta dapat menghambat pembangunan.

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan bangsa Indonesia ke depan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat fisik dan mental serta mempunyai keterampilan dan keahlian kerja. Orang yang memiliki keterampilan dan keahlian kerja diharapkan mampu membangun keluarganya melalui penghasilan yang diperoleh sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup, kesehatan, dan pendidikan bagi anggota keluarganya.

Telah dikemukakan pada uraian sebelumnya bahwa pengangguran terjadi tidak hanya disebabkan oleh jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil daripada jumlah pencari kerja, tetapi juga karena kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan persyaratan pasar kerja (Depnakertrans,

2004b). Senada dengan itu, Ruwiyanto (1994: 3) mengungkapkan bahwa salah satu penyebab utama pengangguran adalah ketidakcocokan keterampilan. Artinya keterampilan yang dimiliki calon tenaga kerja tidak diperlukan pada lapangan kerja yang tersedia. Ketidakcocokan keterampilan itu disebabkan oleh kelambanan penyesuaian program-program pendidikan terhadap perubahan lingkungan, sehingga antisipasi pendidikan terhadap *real need* lingkungannya meleset.

Coombs (1984) menganggap bahwa pendidikan nonformal yang tepat, seperti kursus dapat dijadikan sebagai suatu alternatif selain pendidikan formal untuk memerangi kemiskinan. Lebih lanjut Bellante dan Jackson (1990: 172) mengutarakan bahwa tingkat pendidikan dan keterampilan mempengaruhi tingkat pendapatan. Mereka yang mempunyai pendidikan dan keterampilan lebih tinggi cenderung memperoleh pendapatan yang lebih tinggi pula.

Ditinjau dari dimensi pembangunan nasional secara keseluruhan, pendidikan merupakan salah satu wadah meningkatkan sumber daya manusia Indonesia. Meskipun secara makro, peningkatan sumber daya manusia juga mencakup aspek sosial dan ekonomi, namun dimensi utama dan kuncinya adalah pendidikan. Bahkan menurut Suryadi (1999), peningkatan sumber daya manusia identik dengan peningkatan pendidikan. Pendidikan adalah proses memanusiakan manusia dalam arti mengaktualisasikan semua potensi yang dimiliki menjadi kemampuan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat luas. Muara dari suatu proses pendidikan adalah dunia kerja, baik sektor formal maupun sektor nonformal (Suderadjat, 2003: 20).

Dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan dapat diperoleh melalui tiga jalur, yaitu jalur formal, nonformal, dan informal. Khusus mengenai pendidikan nonformal, Sudjana (2005) menguraikan bahwa pendidikan nonformal dapat dilakukan dalam satuan dan jenis pendidikan kelompok belajar, kursus dan pelatihan, serta satuan pendidikan lain yang sejenis. Pendidikan nonformal lebih mengutamakan keluarannya pada penguasaan *functional skills* berupa keterampilan produktif, teknik, sosial, fisikal, artistika, manajerial, atau kecakapan hidup lainnya, sehingga lulusannya mampu memahami dan mendayagunakan lingkungannya dalam kehidupan mandiri serta diharapkan dapat membuka lapangan kerja.

Apabila mengacu pada uraian Sudjana (2005), seharusnya pendidikan nonformal (lembaga kursus) dengan segera dapat menyesuaikan keterampilan warga belajar agar kebutuhan nyata lingkungan dapat dipenuhi, namun kenyataannya masih banyak tamatan kursus yang sulit diterima di pasar tenaga kerja (*Kompas-online*, 22-1-2003). Hal ini disebabkan oleh kompetensi yang dimiliki lulusan, tidak sesuai yang diharapkan oleh pasar tenaga kerja, terutama di dunia industri.

Secara teoretis lembaga kursus berfungsi menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan kecakapan hidup untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, berusaha mandiri dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat/jenjang yang lebih tinggi (UU No.20/2003, Pasal 6 ayat 5). Namun secara empirik banyak lulusan lembaga kursus tidak memperoleh manfaat apapun dari kursusnya, meskipun telah menghabiskan sekian banyak waktu dan biaya di lembaga kursusnya.

Ketidakadaan manfaat hasil kursus yang dirasakan oleh warga masyarakat jelas bertolak belakang dengan harapan awal sebelum mereka kursus. Warga masyarakat umumnya mengikuti kursus berharap bisa menguasai satu atau beberapa keterampilan tertentu, yang dapat dijadikan bekal hidup di masyarakat. Apabila lembaga kursus tidak bisa memenuhi harapan masyarakat sebagai pengguna jasanya, maka lembaga kursus itu tidak akan dipercaya dan kredibilitasnya jatuh. Pada jangka panjang lembaga itu akan mati dengan sendirinya akibat harapan masyarakat diabaikan dari perspektif kualitas dan kebutuhan.

Hadirnya lembaga *in house training* di berbagai perusahaan sesungguhnya tidak lepas dari kesulitan dunia usaha dan industri menemukan tenaga kerja yang memiliki kualifikasi yang mereka perlukan. Alasannya, hanya dengan cara inilah dunia usaha dan industri bisa memperoleh sumber daya manusia yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Munculnya *in house training* ini bisa dikatakan sebagai "mosi tidak percaya" pada lembaga kursus pada khususnya dan lembaga pendidikan pada umumnya untuk menghasilkan lulusan yang dibutuhkan dunia usaha dan industri (*Kompas-online*, 22-1-2003). Pernyataan ini menunjukkan bahwa lembaga kursus harus melakukan manajemen penyelenggaraan kursus secara profesional, termasuk survei kebutuhan pasar tenaga kerja. Dengan demikian, dapat meminimalkan atau tidak ada lagi lembaga kursus yang didirikan hanya sekadar mengikuti *trend* sesaat, tanpa memikirkan tingkat keterserapan lulusannya di bursa kerja.

Jumlah lembaga kursus tahun 2003 mencapai 25 ribu yang terbagi dalam 10 rumpun dengan 160 jenis kualifikasi keterampilan yang ditawarkan (Depdiknas, 2003f). Jumlah ini merupakan potensi yang cukup besar

dalam mengembangkan sumber daya manusia Indonesia. Akan tetapi peningkatan jumlah lembaga kursus tidak diikuti dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan yang memadai. Penelitian yang dilakukan oleh Balitbang Dikbud pada tahun 1997 menyimpulkan bahwa komponen-komponen dari jenis kursus seperti persyaratan warga belajar dan tenaga pendidik, kurikulum, sarana dan prasarana, sistem pengujian serta pelaksanaan proses belajar mengajar, pada umumnya telah dimiliki oleh lembaga kursus, tetapi belum sepenuhnya mempunyai standar yang baik.

Tidak terpenuhinya standar penyelenggaraan yang baik oleh lembaga kursus, berdampak pada *output* dan *outcomenya*, yakni warga belajar tidak memperoleh manfaat yang dicita-citakan setelah mereka menamatkan kursusnya. Manfaat yang dimaksud diantaranya adalah terpenuhinya kebutuhan warga belajar. Kebutuhan utama mereka adalah pemenuhan kebutuhan memperoleh pekerjaan, berwiraswasta, mengembangkan profesi, dan menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari. Semua kebutuhan tersebut pada intinya adalah untuk pemenuhan kebutuhan memperoleh pangan. Dalam teori '*hierarchy of need*' yang dikemukakan oleh Maslow, pangan dikategorikan sebagai '*physiological/survival need*' setiap orang. Walaupun memperoleh pekerjaan merupakan kebutuhan yang nilainya lebih tinggi dan masuk kebutuhan akan harga diri, tetapi pangan diperoleh melalui kerja atau pekerjaan. Dengan demikian kebutuhan memperoleh pangan harus didahului oleh kebutuhan memperoleh pekerjaan.

Perolehan pekerjaan termasuk salah satu dari beberapa jenis posisi sosial, tetapi dari semua jenis kebutuhan, pangan tetap yang paling mendesak guna mempertahankan hidup manusia. Setiap orang yang telah dewasa meskipun "tersisih" dari lintasan pendidikan formal sangat me-



jumlah orang yang memerlukan perilaku produktif melalui pendidikan nonformal sudah semakin besar, sementara kemampuan lembaga pendidikan yang ada—terutama lembaga kursus untuk menyiapkan warga belajar menjadi siap kerja—masih belum memuaskan.

Ketidakpuasan inilah yang menggugah penulis untuk menelitinya, dengan melakukan studi eksplorasi berbagai faktor yang berasal dari lembaga kursus yang menyebabkan ketidakmampuan warga belajar mendayagunakan hasil belajarnya setelah tamat. Setelah itu, penelitian ini dilanjutkan dengan mengembangkan suatu model penyelenggaraan sistem pembelajaran pada lembaga kursus dengan tujuan agar setiap warga belajar yang telah mengikuti kursus pada lembaga kursus dapat dengan segera mendayagunakan hasil belajarnya. Model ini dipilih didasarkan atas lima alasan.

Pertama, warga belajar yang mengikuti kursus di lembaga kursus pada umumnya bertujuan mencari pekerjaan, meningkatkan pekerjaan, berwiraswasta, mengembangkan profesi, dan menunjang aktivitas kehidupan sehari-harinya. Atas dasar itu warga belajar perlu dibekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang memadai sehingga warga belajar dapat lebih berdaya dan memperoleh manfaat dari hasil kursusnya.

Kedua, model standardisasi dan akreditasi penyelenggaraan sistem pembelajaran di lembaga kursus telah lama dicanangkan, namun sampai saat ini belum mendapat tanggapan serius dari pemerintah, penyelenggara kursus, dan asosiasi profesi sebagai mitra kerja lembaga kursus.

Ketiga, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan sistem pembelajaran di lembaga kursus belum dilaksanakan

secara profesional, terutama instruktur yang dipilih berdasarkan unsur kolegal, bukan atas dasar kompetensi, akibatnya *output* dan *outcome* yang dihasilkan oleh lembaga kursus tidak profesional.

Keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan* yang mengharuskan semua penyelenggara pendidikan, termasuk lembaga kursus menerapkan standar nasional pendidikan. Standar yang dimaksud terdiri atas delapan, yaitu standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Mengacu pada hal ini, perlu dirancang model implementasi pada lembaga kursus yang mengarah pada standar nasional pendidikan dalam wujud kajian ilmiah.

Kelima, jumlah pengangguran semakin meningkat disebabkan antara lain karena kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja. Lulusan pendidikan formal kurang, bahkan tidak dibekali dengan keterampilan untuk memasuki dunia kerja. Demikian pula dengan lulusan pendidikan nonformal (lembaga kursus) juga tidak atau belum memperoleh bekal keterampilan yang memadai dalam memasuki dunia kerja. Melalui model pembelajaran lembaga kursus yang ideal, maka pencari kerja diharapkan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kajian terhadap model penyelenggaraan sistem pembelajaran di lembaga kursus dianggap cukup strategis untuk memberdayakan warga belajar setelah tamat.



Identifikasi Masalah

Lembaga kursus berdasarkan data berjumlah sekitar 25 ribu yang terbagi dalam 10 rumpun dengan 160 jenis kualifikasi keterampilan (Depdiknas, 2003f), bukan merupakan jumlah pasti. Hal ini disebabkan oleh karena banyak kursus yang berdiri dan ditutup dalam waktu yang relatif singkat, sehingga menyulitkan untuk mengkalkulasi dengan tepat. Penyebabnya antara lain, yakni lembaga kursus tidak dapat memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan harapan warga belajar. Oleh sebab itu, pertanyaan mengenai berapa jumlah sebenarnya kursus yang ada di Indonesia, sulit atau mungkin tidak akan pernah terjawab.

Pada umumnya lembaga-lembaga kursus berusaha menarik minat masyarakat yang seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya dengan berbagai fasilitas dan janji-janji. Misalnya dengan jaminan mutu dan jaminan kerja. Namun, tidak jarang masyarakat merasa kecewa dan dirugikan, disebabkan oleh komponen pendukung pembelajaran tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dampak akhir adalah warga belajar yang telah tamat tidak dapat dengan segera memperoleh manfaat dari kursusnya.

Berdasarkan hal tersebut, berikut akan diidentifikasi komponen-komponen lembaga kursus yang diprediksi dapat mempengaruhi kemampuan warga belajar dalam mendayagunakan hasil belajarnya. *Pertama*, warga belajar yang memasuki suatu kursus berasal dari berbagai latar belakang seperti: usia, pekerjaan, status sosial dan ekonomi, tingkat pendidikan formal dan nonformal, motivasi, bakat, minat, dan tujuan mengikuti kursus. Khusus mengenai tujuan, warga belajar yang mengikuti kursus minimal dapat digolongkan dalam tiga kelompok, yaitu: sekadar mengisi waktu luang dan menyalurkan hobi, penyesuaian dan pengem-

bangun diri, dan sebagai sarana untuk mencari pekerjaan. Warga belajar yang tujuan utamanya mengikuti kursus mengisi waktu luang tentu berbeda dengan warga belajar yang ingin mendapatkan pekerjaan. Keanekaragaman latar belakang dan tujuan mengikuti kursus dari warga belajar tentu akan berdampak pada *output* dan *outcome* lembaga kursus tersebut.

Kedua, penyelenggara dan pengelola lembaga kursus pada umumnya masih berorientasi pada kepentingan bisnis. Oleh karena berorientasi bisnis, maka terdapat kecenderungan lembaga kursus ingin menerima dan meluluskan peserta didiknya sebanyak mungkin, meskipun kualitas lulusannya rendah. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* ditegaskan bahwa penyelenggara dan pengelola lembaga kursus termasuk tenaga kependidikan yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan (UUSPN pasal 39 ayat 1 dan penjelasannya). Bertolak dari undang-undang tersebut, penyelenggara dan pengelola dituntut memiliki kemampuan manajerial dan kemampuan teknis kependidikan untuk mengawasi, mengkoordinasi, dan mensosialisasikan program-program yang dijalankan. Tujuannya supaya programnya tetap diminati dan *output* yang dihasilkan mempunyai kompetensi yang sesuai kebutuhan pasar.

Ketiga, tenaga pendidik atau instruktur merupakan komponen utama dan sangat menentukan keberhasilan proses belajar membelajarkan di lembaga kursus (Sudjana, 2005). Keberhasilan itu ditentukan oleh kemampuan yang berwujud kompetensi instruktur dalam empat aspek, yaitu pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Kenyataan di lapangan banyak instruktur yang tidak profesional, terbatas pengetahuan yang di-

ajarkannya, kurang menguasai metode mengajar, dan tidak mengetahui perkembangan mutakhir dari kajian ilmu dan keterampilan yang diajarkannya. Salah satu penyebabnya adalah sistem perekrutannya masih berdasarkan kolegal (Komar, 2001) Pada sisi lain, modus pembelajaran lebih didominasi oleh inisiatif instruktur atau berbasis *teacher centered* bukan kreativitas atau berpusat pada peserta didik (*student centered*).

Keempat, sarana dan prasarana pendidikan lembaga kursus bervariasi antara lembaga kursus yang satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan oleh belum adanya standardisasi. Sarana dan prasarana akan berdampak kepada kenyamanan dan keamanan yang berujung pada efektivitas belajar mengajar. Sarana dan prasarana pendidikan dapat dikategorikan sebagai berikut: (1) gedung yang meliputi: ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, dan kelengkapannya, tempat ibadah, toilet, dan sebagainya, (2) bahan dan alat belajar yang meliputi: buku-buku pelajaran, modul-modul, komputer, mesin jahit, peralatan bengkel, dan bahan/alat belajar lain sesuai jenis kursus yang diselenggarakan, dan (3) media pembelajaran, seperti OHP, video program, dan alat peraga lainnya. Kenyataannya masih terdapat lembaga kursus yang menyelenggarakan pembelajaran di kolong rumah tanpa menggunakan media pembelajaran.

Kelima, kurikulum dan program pendidikan yang digunakan pada lembaga kursus harus memperhatikan materi-materi belajar yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha/industri. Oleh karena itu, bekal keterampilan yang diberikan di lembaga-lembaga kursus harus bermutu dan dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha dan industri. Jenis kurikulum yang digunakan di lembaga kursus terdiri atas kurikulum lokal, kurikulum nasional, dan kurikulum internasional. Adapun teknik

penyusunannya melibatkan para tenaga instruktur, tenaga ahli di bidangnya, praktisi, dan pemakai jasa lulusan. Kenyataan di lapangan, masih banyak lembaga kursus yang menggunakan kurikulum lokal. Bahkan ada instruktur mengajar/melatih tanpa menggunakan kurikulum tertulis, hanya menyampaikan apa yang ia ketahui. Demikian pula dengan program pendidikan lembaga kursus. Sebagian besar lembaga kursus tidak mengadopsi sistem, metode, dan teknik pembelajaran yang dapat menggugah warga belajar untuk belajar secara cepat dan menyenangkan dengan hasil yang memuaskan.

Keenam, komponen terpenting dari penyelenggaraan sistem pembelajaran di lembaga kursus adalah terletak pada proses belajar membelajarkan. Di sinilah terjadi interaksi antara warga belajar dan sumber belajar dengan menggunakan segala sarana dan prasarana yang ada. Secara ideal proses belajar membelajarkan di lembaga kursus dilaksanakan dengan belajar teori dan praktik. Praktik dapat dilaksanakan, baik di kelas/laboratorium maupun magang di dunia usaha/industri. Pelaksanaan praktik kerja sangat penting, sebab akan menjamin kesiapan warga belajarnya memasuki dunia kerja. Setelah dilaksanakan pembelajaran teori dan praktik diadakan evaluasi untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi proses belajar membelajarkan. Evaluasi belajar dilaksanakan oleh lembaga kursus sendiri atau dapat pula bekerja sama dengan pihak lain. Pada bagian akhir dari proses belajar membelajarkan, dilakukan pengujian untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam mengikuti proses belajar mengajar baik teori maupun praktik. Setelah pengujian, dilanjutkan dengan sertifikasi, yang merupakan bentuk pemberian pengakuan kemampuan kepada seseorang yang telah menyelesaikan suatu program pendidikan baik tingkat

lokal, nasional, maupun internasional. Bentuk pengujiannya dilakukan melalui: (1) ujian lokal, yaitu ujian yang diselenggarakan oleh lembaga kursus sendiri, (2) ujian nasional, diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional secara nasional, dan (3) ujian internasional, yaitu ujian yang diselenggarakan untuk mendapatkan pengakuan kemampuan tingkat internasional. Selain itu, terdapat pula ujian kompetensi yang diselenggarakan atas kerjasama antara lembaga kursus dengan dunia usaha/industri dan/atau asosiasi profesi.

Ketujuh, peran serta pemerintah (Departemen Pendidikan Nasional) untuk memberikan perizinan, dan melakukan pembinaan kepada lembaga kursus Diklusemas, serta memberikan bantuan dana dan sarana/prasarana belajar akan sangat berpengaruh pada eksistensi lembaga kursus dan masa depan warga belajarnya. Perizinan yang dimaksud adalah suatu ketetapan pemerintah untuk memberikan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status penyelenggaraan kursus dalam melaksanakan programnya. Izin kursus diberikan untuk satu jenis kursus pada satu alamat tertentu. Perizinan kursus telah mengalami beberapa kali penyempurnaan. Yang terakhir adalah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang *Penyelenggaraan Kursus*. Tujuan perizinan penyelenggaraan kursus adalah: (1) memudahkan pemerintah dalam mengadakan pembinaan yang mencakup penyelenggaraan kursus, pengujian dan sertifikasi, standardisasi dan akreditasi kursus, (2) memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan pembangunan, (3) melindungi kursus terhadap tindakan di luar peraturan perundang-undangan yang berlaku, (4) melindungi warga masya-

rakat terhadap penyalahgunaan wewenang, hak dan kewajiban penyelenggaraan setiap jenis kursus, dan (5) memberikan tanggung jawab hukum kepada lembaga kursus (Depdiknas, 2003a).

Kedelapan, keberhasilan lembaga kursus mengantar warga belajarnya untuk masuk ke dunia kerja banyak dipengaruhi oleh program kemitraan yang dilakukan oleh lembaga kursus. Kemitraan dan kerjasama lembaga kursus dapat dilakukan bersama dengan instansi pemerintah dan swasta, dunia usaha dan industri, asosiasi profesi, sesama lembaga kursus, dan dengan organisasi Himpunan Penyelenggara Kursus Indonesia (HIPKI), serta dengan Himpunan Seluruh Pendidik dan Penguji Indonesia (HISPPPI). Bentuk kerjasama antara lain dalam hal: (1) pengembangan dan penyusunan kurikulum, (2) pengembangan program, (3) pengadaan tenaga pendidik/instruktur, (4) pengujian dan sertifikasi, (5) tempat praktik magang, dan (6) penyaluran lulusan.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, dapat dikemukakan bahwa banyak tamatan lembaga kursus tidak dapat “berbuat apa-apa” dan sulit diterima di pasar kerja setelah mereka menamatkan kursusnya di lembaga kursus. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait dalam proses belajar membelajarkan seperti: kondisi warga belajar yang berasal dari berbagai latar belakang, instruktur, sarana dan prasarana, kurikulum dan program pendidikan, proses belajar membelajarkan, peran serta pemerintah, dan program kemitraan yang dijalankan oleh lembaga kursus. Kuantitas dan kualitas komponen yang berinteraksi tersebut akan sangat berpengaruh pada *output* dan *outcome* lembaga kur-

sus. Bertolak dari hal tersebut, permasalahan umum penelitian ini adalah *bagaimana model penyelenggaraan sistem pembelajaran pada lembaga kursus yang dapat memberdayakan warga belajar setelah tamat?*

Berdasarkan masalah umum tersebut, dirumuskan empat permasalahan khusus yaitu:

1. Bagaimana kontribusi komponen-komponen sistem pembelajaran di lembaga kursus terhadap keberdayaan warga belajar setelah tamat?

Bertolak dari masalah khusus pertama ini, dirumuskan tujuh masalah spesifik yaitu:

- a. Seberapa besar kontribusi latar belakang warga belajar sebelum mengikuti kursus terhadap keberdayaannya setelah tamat?
 - b. Seberapa besar kontribusi latar belakang instruktur lembaga kursus terhadap keberdayaan warga belajar setelah tamat?
 - c. Seberapa besar kontribusi sarana dan prasarana pendidikan lembaga kursus terhadap keberdayaan warga belajar setelah tamat?
 - d. Seberapa besar kontribusi kurikulum dan program pendidikan yang digunakan lembaga kursus terhadap keberdayaan warga belajar setelah tamat?
 - e. Seberapa besar kontribusi proses belajar membelajarkan di lembaga kursus terhadap keberdayaan warga belajar setelah tamat?
 - f. Seberapa besar kontribusi peran serta pemerintah di lembaga kursus terhadap keberdayaan warga belajar setelah tamat?
 - g. Seberapa besar kontribusi program kemitraan lembaga kursus terhadap keberdayaan warga belajar setelah tamat?
2. Bagaimana model penyelenggaraan sistem pembelajaran unggulan pada lembaga kursus yang dapat memberdayakan warga belajar?

3. Bagaimana implementasi model penyelenggaraan sistem pembelajaran unggulan pada lembaga kursus yang dapat memberdayakan warga belajar?
4. Apakah terdapat perbedaan antara kursus yang menggunakan model penyelenggaraan sistem pembelajaran unggulan dengan model konvensional dalam upaya memberdayakan warga belajar setelah tamat?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengembangkan sebuah model penyelenggaraan sistem pembelajaran pada lembaga kursus dalam upaya memberdayakan warga belajar. Dalam mencapai tujuan ini, pertama-tama dilakukan studi eksplorasi melalui penelitian korelasional untuk mendapatkan gambaran empirik tentang faktor-faktor atau komponen-komponen yang berkontribusi terhadap keberdayaan warga belajar. Studi korelasional tersebut diarahkan pada suatu anggapan bahwa keberdayaan warga belajar atau kemampuan warga belajar mendayagunakan hasil belajarnya setelah tamat dari lembaga kursus dipengaruhi oleh sekelompok variabel bebas tertentu yang ada dalam wilayah penyelenggaraan kursus. Melalui temuan hasil penelitian korelasional, selanjutnya disusun sebuah model konseptual. Model konseptual tersebut diujicobakan efektivitasnya melalui penelitian eksperimental. Berdasarkan hasil uji coba tersebut, dilakukan penghalusan-penghalusan yang pada akhirnya menjadi produk akhir dari penelitian ini.

Dengan demikian studi ini diawali dengan penelitian korelasional untuk mengetahui faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberdayaan warga belajar. Setelah itu dilanjutkan dengan penelitian eksperimental

untuk mengetahui efektivitas model penyelenggaraan sistem pembelajaran lembaga kursus yang telah dirancang. Tujuan penelitian selengkapnya adalah:

1. Mengetahui kontribusi komponen-komponen belajar membelajarkan di lembaga kursus terhadap keberdayaan warga belajar setelah tamat.
 - a. Mengetahui kontribusi variabel latar belakang warga belajar sebelum mengikuti kursus terhadap keberdayaannya setelah tamat.
 - b. Mengetahui kontribusi variabel latar belakang instruktur lembaga kursus terhadap keberdayaan warga belajar setelah tamat.
 - c. Mengetahui kontribusi variabel sarana dan prasarana pendidikan lembaga kursus terhadap keberdayaan warga belajar setelah tamat.
 - d. Mengetahui kontribusi variabel kurikulum dan program pendidikan yang digunakan lembaga kursus terhadap keberdayaan warga belajar setelah tamat.
 - e. Mengetahui kontribusi proses belajar membelajarkan di lembaga kursus terhadap keberdayaan warga belajar setelah tamat.
 - f. Mengetahui kontribusi variabel peran serta pemerintah di lembaga kursus terhadap keberdayaan warga belajar setelah tamat.
 - g. Mengetahui kontribusi program kemitraan lembaga kursus terhadap keberdayaan warga belajar setelah tamat.
2. Merumuskan model penyelenggaraan sistem pembelajaran unggulan pada lembaga kursus yang dapat memberdayakan warga belajar.
3. Mengimplementasikan model penyelenggaraan sistem pembelajaran unggulan pada lembaga kursus yang dapat memberdayakan warga belajar.

4. Mengetahui perbedaan antara kursus yang menggunakan model penyelenggaraan sistem pembelajaran unggulan dengan model konvensional dalam upaya memberdayakan warga belajar setelah tamat.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara praktis maupun untuk kepentingan pengembangan konsep teoretis. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang tepat bagi pemerintah, lembaga swasta, dan lembaga penyelenggara kursus dalam upaya meningkatkan pelayanan pendidikan bagi peserta didik (warga belajar) guna memberdayakannya setelah kursus. Warga belajar yang berdaya dengan mudah dapat bekerja mencari nafkah dan mengembangkan diri untuk meningkatkan taraf hidupnya, yang berdampak pada pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan.

Manfaat teoretis penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan proposisi-proposisi empirik yang memungkinkan dikembangkan lebih lanjut menjadi teori guna menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan nonformal.

F. Batasan Istilah dan Definisi Operasional

Beberapa istilah yang digunakan perlu dikemukakan batasan dan definisi operasionalnya untuk dijadikan pegangan dalam penelitian ini.

1. Batasan Istilah

Dalam rangka menghindari kekeliruan dalam memberikan arti dan makna istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu diberikan batasan yang jelas.

Pertama, model penyelenggaraan sistem pembelajaran adalah suatu model atau pola pendekatan sistem yang dirancang dan dijalankan untuk mengoptimalkan seluruh komponen pendukung belajar dan membelajarkan di lembaga kursus dalam upaya menghasilkan *output* dan *outcome* yang memadai. Komponen pendukung belajar dan membelajarkan adalah: (1) calon warga belajar sebagai *raw input*, (2) instruktur, sarana/prasarana pendidikan, kurikulum dan program pendidikan sebagai *instrumental input*, (3) peran serta pemerintah dan program kemitraan sebagai *environmental input*, dan (4) kegiatan proses belajar membelajarkan sebagai *throughput*.

Kedua, lembaga kursus adalah suatu wadah pendidikan dan latihan yang dijalankan secara teratur dan terorganisir, diselenggarakan oleh swasta (perorangan dan yayasan) di bawah pembinaan Depdiknas, bertujuan memberikan pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Ketiga, warga belajar adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti kegiatan belajar membelajarkan di lembaga kursus. Warga belajar berasal dari berbagai latar belakang, yaitu: (a) usia, (b) jenis kelamin, (c) status perkawinan, (d) latar belakang pendidikan formal dan nonformal, (e) status pekerjaan, dan (f) bakat dan minat.

Keempat, instruktur adalah orang yang bertugas melaksanakan pembelajaran, dan memberikan latihan, serta membimbing warga belajar di lembaga kursus. Instruktur terdiri atas beberapa indikator, yaitu: (a) pendidikan formal dan nonformal, (b) pelatihan sebagai instruktur, (c) pengalaman menjadi instruktur, (d) pekerjaan, dan (e) kompetensi.



Kelima, sarana dan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang menunjang terselenggaranya pembelajaran di lembaga kursus yang berdampak pada kenyamanan, keamanan, dan peningkatan efektivitas belajar membelajarkan. Sarana dan prasarana pendidikan terdiri atas: (a) gedung/ruang belajar, termasuk laboratorium/tempat praktik, dan perpustakaan; (b) bahan belajar; dan (c) media pembelajaran.

Keenam, kurikulum dan program pendidikan adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan di lembaga kursus.

Ketujuh, proses belajar membelajarkan adalah serangkaian prosedur yang dijalankan oleh lembaga kursus dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan proses interaksi belajar membelajarkan antara warga belajar dan sumber belajar dengan menggunakan segala sarana dan prasarana yang ada, penilaian proses dan hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran.

Kedelapan, peran serta pemerintah adalah keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan lembaga kursus. Tujuannya agar penyelenggaraan kursus berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan lembaga kursus dapat berperan lebih besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bentuk peran serta pemerintah adalah: (1) pemberian perizinan; (2) pembinaan: supervisi, pengawasan, monitoring, dan evaluasi/pelaporan; dan (3) bantuan dana dan sarana belajar kepada lembaga kursus.

Kesembilan, program kemitraan adalah kebijakan yang ditempuh oleh lembaga kursus untuk menjalin kerjasama dengan sesama lembaga

kursus dan organisasi lembaga kursus, pihak instansi pemerintah, lembaga swasta, dan dunia usaha/industri, dalam rangka membantu meningkatkan kualitas penyelenggaraan kursus. Kemitraan berbentuk kerjasama dalam hal: (1) penyusunan kurikulum, (2) tempat praktik kerja/magang, dan (2) penyaluran lulusan.

Kesepuluh, keberdayaan warga belajar adalah kemampuan warga belajar mendayagunakan atau memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh setelah tamat dari lembaga kursus untuk: meningkatkan pekerjaan, meningkatkan penghasilan, membantu dan membelajarkan orang lain, meningkatkan jumlah relasi, dan meningkatkan kepercayaan diri warga belajar.

2. Definisi Operasional

Berdasarkan batasan istilah, berikut ini dikemukakan definisi operasional indikator variabel yang diteliti beserta teknik pengukurannya.

- a. Usia warga belajar merupakan indikator pertama dari variabel bebas pertama (X_1), dioperasionalkan sebagai usia kronologis atau tingkat kematangan warga belajar sebelum kursus.
- b. Jenis kelamin warga belajar merupakan indikator kedua dari variabel bebas pertama (X_1), dioperasionalkan sebagai jenis kelamin dari warga belajar yang terdiri atas laki-laki dan perempuan.
- c. Status perkawinan warga belajar merupakan indikator ketiga dari variabel bebas pertama (X_1), dioperasionalkan sebagai status perkawinan sebelum kursus yang terdiri atas dua kategori yaitu: belum kawin dan kawin.
- d. Latar belakang pendidikan formal dan nonformal warga belajar merupakan indikator keempat dari variabel bebas pertama (X_1), dioperasio-

nalkan sebagai pendidikan formal dan pendidikan nonformal yang pernah dijalani oleh warga belajar sebelum kursus. Pendidikan formal diukur berdasarkan jenjang pendidikan sekolah, yang terdiri atas SD, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, Diploma, S1, S2, dan S3. Adapun pendidikan nonformal didasarkan oleh jenis dan lama pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti.

- e. Pekerjaan warga belajar merupakan indikator kelima dari variabel bebas pertama (X1), dioperasionalkan sebagai status pekerjaan warga belajar sebelum kursus yang terdiri atas dua kategori utama yaitu: bekerja (mempunyai pekerjaan yang menghasilkan pendapatan), dan belum bekerja.
- f. Bakat dan minat warga belajar merupakan indikator keenam dari variabel bebas pertama (X1), dioperasionalkan sebagai tingkatan besarnya bakat dan minat warga belajar mengenai jenis kursus yang diikutinya.
- g. Latar belakang pendidikan instruktur merupakan indikator pertama dari variabel bebas kedua (X2), dioperasionalkan sebagai pendidikan formal dan pendidikan nonformal yang pernah dijalani oleh instruktur. Pendidikan formal diukur berdasarkan jenjang pendidikan sekolah yang terdiri atas SD, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, Diploma, S1, S2, dan S3. Pendidikan nonformal didasarkan atas jenis dan lama pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti.
- h. Pelatihan yang diikuti sebagai instruktur kursus merupakan indikator kedua dari variabel bebas kedua (X2), dioperasionalkan sebagai jenis-jenis kursus dan pelatihan yang pernah diikuti oleh instruktur yang berkaitan langsung dengan profesi instruktur dan jenis keterampilan yang diajarkan.

- i. Pengalaman mengajar instruktur kursus merupakan indikator ketiga dari variabel bebas kedua (X2), dioperasionalkan sebagai lama pengalaman menjadi instruktur yang berkaitan dengan keterampilan yang diajarkan.
- j. Latar belakang pekerjaan instruktur merupakan indikator keempat dari variabel bebas kedua (X2), dioperasionalkan sebagai jenis pekerjaan utama yang ditekuni instruktur.
- k. Kompetensi instruktur merupakan indikator kelima dari variabel bebas kedua (X2), dioperasionalkan sebagai kemampuan atau kompetensi instruktur sebagai agen pembelajaran yang mengacu pada pasal 28 ayat 3 PP No 19 tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*, meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.
- l. Gedung dan ruang belajar lembaga kursus merupakan indikator pertama dari variabel bebas ketiga (X3), dioperasionalkan dalam empat kategori yaitu: (1) jumlah, kelengkapan, dan kenyamanan gedung/ruang belajar; (2) ketersediaan, kelengkapan, dan kenyamanan ruang praktik/laboratorium; (3) ketersediaan dan kenyamanan ruang perpustakaan, serta kelengkapan buku-buku perpustakaan; dan (4) ketersediaan sarana dan prasarana pendukung lainnya.
- m. Bahan belajar yang digunakan di lembaga kursus merupakan indikator kedua dari variabel bebas ketiga (X3), dioperasionalkan dalam empat kategori yaitu: kelengkapan bahan belajar, kemenarikan/kemudahan memahami bahan belajar, kebaruan/aktualitas bahan belajar, dan kesesuaian bahan belajar dengan tujuan belajar.

- n. Media pembelajaran lembaga kursus merupakan indikator ketiga dari variabel bebas ketiga (X3), dioperasionalkan dalam empat kategori yaitu: kelengkapan media belajar, kemenarikan/kemudahan memahami media belajar, kebaruan/aktualitas media belajar, dan kesesuaian media belajar dengan tujuan belajar.
- o. Jenis dan desain kurikulum yang digunakan lembaga kursus merupakan indikator pertama dari variabel bebas keempat (X4), dioperasionalkan dalam dua kategori, yaitu: jenis kurikulum yang digunakan dan desain kurikulum yang relevan dengan dunia kerja dan berorientasi pada *life skill*.
- p. Program pendidikan yang dijalankan lembaga kursus merupakan indikator kedua dari variabel bebas keempat (X4), dioperasionalkan sebagai sistem pembelajaran, jenis pembelajaran, rancangan pemanfaatan bahan belajar, rancangan penggunaan media pembelajaran, variasi penggunaan metode/teknik pembelajaran, ketepatan dalam menggunakan metode/teknik pembelajaran, keterandalan metode/teknik pembelajaran, sistem evaluasi, lama program kursus, jumlah pertemuan kelas setiap minggu, jumlah jam setiap pertemuan, tingkat efisiensi penggunaan waktu pembelajaran, alternatif waktu pembelajaran, dan biaya penyelenggaraan kursus.
- q. Perencanaan pembelajaran merupakan indikator pertama dari variabel bebas kelima (X5), dioperasionalkan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh instruktur dalam merencanakan proses belajar membelajarkan seperti membuat silabus dan rencana pembelajaran.
- r. Proses interaksi belajar membelajarkan merupakan indikator kedua dari variabel bebas kelima (X5), dioperasionalkan sebagai proses inter-

aksi edukatif antara warga belajar yang ingin belajar (memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap) dengan instruktur yang siap membelajarkan.

- s. Penilaian pembelajaran merupakan indikator ketiga dari variabel bebas kelima (X5), dioperasionalkan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh instruktur di dalam memberikan penilaian proses dan hasil pembelajaran kepada warga belajar, dan sekaligus memberikan pengajaran remedial bila diperlukan.
- t. Pengawasan pembelajaran merupakan indikator keempat dari variabel bebas kelima (X5), dioperasionalkan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh instruktur di dalam memberikan pengawasan terhadap proses pembelajaran.
- u. Status perizinan yang dimiliki lembaga kursus merupakan indikator pertama dari variabel bebas keenam (X6), dapat dioperasionalkan sebagai status perizinan, kemudahan memperoleh izin, manfaat perizinan, dan perpanjangan perizinan.
- v. Kegiatan pembinaan dari pemerintah (Diknas) merupakan indikator kedua dari variabel bebas keenam (X6), dioperasionalkan sebagai peran serta pemerintah dalam supervisi, pengawasan, dan monitoring, serta pemberian predikat/penghargaan kepada lembaga kursus.
- w. Bantuan dana/sarana yang diperoleh lembaga kursus dari pemerintah merupakan indikator ketiga dari variabel bebas keenam (X6), dioperasionalkan sebagai bantuan dana, dan sarana/prasarana yang diperoleh dari pemerintah.
- x. Kemitraan lembaga kursus dalam organisasi lembaga kursus merupakan indikator pertama dari variabel bebas ketujuh (X7), dioperasional-

kan dalam tiga kategori, yaitu: (1) keanggotaan lembaga kursus dalam organisasi Himpunan Penyelenggara Kursus Indonesia (HIPKI) yakni organisasi yang menghimpun para pemilik/penyelenggara/pengelola kursus dan pelatihan; (2) Himpunan Seluruh Pendidik dan Penguji Indonesia (HISPPPI) yakni organisasi yang menghimpun para tenaga pendidik/fasilitator/instruktur dan penguji (praktik dan lisan) ujian nasional kursus dan pelatihan; dan (3) kemitraan lembaga kursus dengan sesama lembaga kursus.

- y. Kemitraan lembaga kursus dengan instansi pemerintah/swasta kursus merupakan indikator kedua dari variabel bebas ketujuh (X7), dioperasionalkan sebagai: (1) jalinan kerjasama antara lembaga kursus dan instansi pemerintah seperti: kerjasama dengan perguruan tinggi negeri, kerjasama dengan departemen, dan kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya; (2) jalinan kerjasama antara lembaga kursus dan lembaga swasta seperti: kerjasama dengan perguruan tinggi swasta, dan kerjasama dengan lembaga swasta lainnya.
- z. Kemitraan lembaga kursus dengan dunia usaha/industri kursus merupakan indikator ketiga dari variabel bebas ketujuh (X7), dioperasionalkan sebagai jalinan kerjasama antara lembaga kursus dan BUMN dan perusahaan-perusahaan swasta.
- aa. Keberdayaan warga belajar merupakan variabel terikat (Y) dioperasionalkan sebagai kemampuan warga belajar dalam mendayagunakan hasil belajarnya untuk: (1) meningkatkan pekerjaan/aktivitas (status, kualitas, kuantitas, dan fasilitas), (2) meningkatkan penghasilan, (3) membantu dan membelajarkan orang lain, (4) meningkatkan jumlah relasi, dan (5) meningkatkan kepercayaan diri warga belajar.

G. Kerangka Pemikiran

Beberapa uraian berikut ini menjadi kerangka pemikiran yang menjadi dasar pelaksanaan penelitian guna menjawab permasalahan yang telah diajukan.

1. Hubungan Fungsional Antarkomponen Lembaga Kursus

Lembaga kursus sebagai salah satu satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, mempunyai enam komponen utama, yaitu: (1) komponen calon warga belajar sebagai *raw input*, (2) komponen penyelenggara/pengelola, komponen instruktur, komponen sarana prasarana pendidikan, komponen kurikulum dan program pendidikan sebagai *instrumental input*, (3) komponen proses belajar membelajarkan sebagai *throughput*, (4) komponen peran serta pemerintah, dan komponen program kemitraan sebagai *environmental input*.

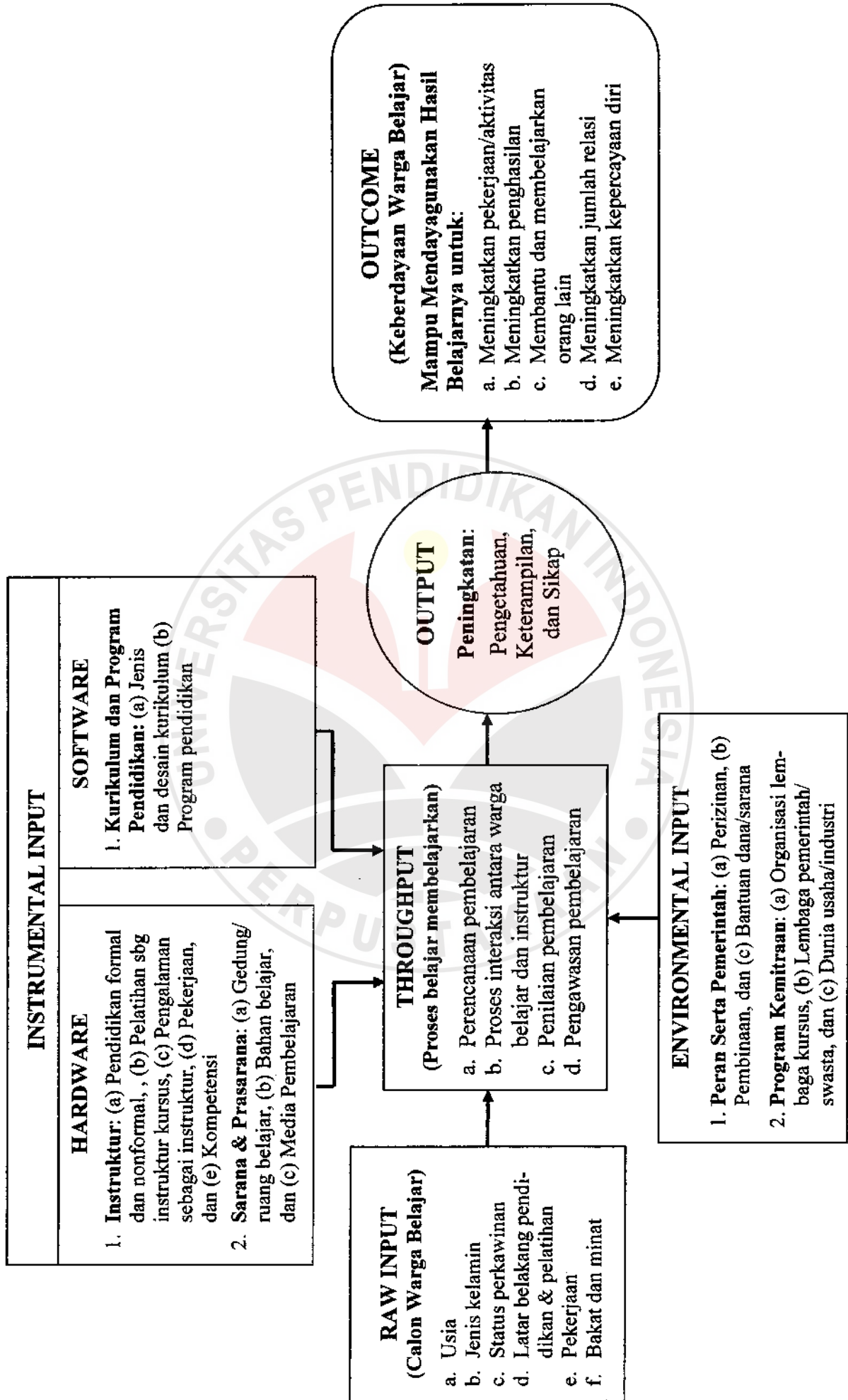
Menurut Ruwiyanto (1994: 48) komponen proses belajar membelajarkan (*throughput*) sebagai komponen sentral yang dipengaruhi langsung oleh komponen *raw input*, dan *instrumental input*, akan sangat berpengaruh terhadap perubahan perilaku warga belajar dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Perilaku baru dari warga belajar yang meliputi ketiga aspek tersebut disebut hasil belajar atau sebagai (5) komponen *output*. Perubahan perilaku yang membentuk perilaku baru warga belajar akibat proses pendidikan yang telah dijalaninya akan memberikan manfaat bagi warga belajar setelah tamat dari lembaga kursus. Manfaat yang diperoleh warga belajar disebut sebagai (6) komponen *outcome*.

Jadi, dalam proses pembelajaran di lembaga kursus selain terjadi interaksi antara variabel warga belajar, instruktur, sarana/prasarana, kurikulum dan program pendidikan, dipengaruhi pula oleh komponen yang



berupa peran serta pemerintah dalam bentuk perizinan, pembinaan (supervisi, pengawasan, dan monitoring), dan bantuan dana dan sarana belajar kepada lembaga kursus. Selain itu, lembaga kursus diharapkan menjalin kemitraan dengan sesama lembaga kursus, organisasi HIPKI dan HISPPI, dan lembaga pemerintah/swasta, serta dengan dunia usaha/industri yang berbentuk kerjasama dalam pengembangan dan penyusunan kurikulum, tempat praktik magang, dan penyaluran lulusan. Dengan demikian, dapat digambarkan hubungan fungsional antarkomponen (variabel) dan wilayah penelitian yang terjangkau seperti tampak dalam skema pada Gambar 1.1.

Berdasarkan berbagai pertimbangan, baik akademis maupun non-akademis, peneliti tidak mengkaji seluruh komponen atau variabel penyelenggaraan sistem pembelajaran di lembaga kursus. Komponen *warga belajar* diambil enam indikator yaitu: (1) usia atau tingkat kematangan (2) jenis kelamin (3) status perkawinan, (4) latar belakang pendidikan dan pelatihan, (5) pekerjaan, dan (6) bakat dan minat. Komponen *instruktur* diambil lima indikator yaitu (1) pendidikan formal dan nonformal, (2) pelatihan sebagai instruktur kursus, (3) pengalaman sebagai instruktur, (4) pekerjaan, dan (5) kompetensi. Komponen *sarana dan prasarana pendidikan* diambil tiga indikator yaitu (1) gedung dan ruang belajar, (2) bahan belajar, dan (3) media pembelajaran. Komponen *kurikulum dan program pendidikan*, diambil dua indikator yaitu: (1) jenis dan desain kurikulum yang digunakan, dan (2) program pendidikan yang dijalankan. Komponen *proses belajar membelajarkan* diambil empat indikator yaitu: (1) perencanaan pembelajaran, (2) proses interaksi belajar membelajarkan antara warga belajar dan instruktur, (3) penilaian proses dan hasil pembelajaran, dan (4)



Gambar 1.1 Hubungan Fungsional Antarkomponen Lembaga Kursus
(Diadaptasi dari Sudjana (1991:32), dan Ruwiyanto (1994:49))

pengawasan proses pembelajaran. Komponen *peran serta pemerintah* diambil tiga indikator, yaitu: (1) perizinan, (2) pembinaan (supervisi, pengawasan, dan monitoring), dan (3) bantuan dana dan sarana/prasarana belajar. Komponen *program kemitraan* diambil tiga indikator yaitu kemitraan dengan: (1) organisasi lembaga kursus (HIPKI, HISPPI, dan sesama lembaga kursus), (2) instansi pemerintah/swasta, dan (3) dunia usaha/industri. Adapun komponen *outcome* dipilih lima indikator yaitu: (1) pekerjaan/aktivitas (status, kualitas, kuantitas, dan fasilitas), (2) penghasilan, (3) membantu dan membelajarkan orang lain, (4) relasi, dan (5) kepercayaan diri.

Khusus mengenai komponen penyelenggara/pengelola lembaga kursus, tidak diteliti. Komponen ini dianggap tidak memberi kontribusi signifikan terhadap *output* dan *outcome*, karena tidak berinteraksi secara langsung dalam proses belajar membelajarkan. Adapun komponen *output* yaitu peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dianggap hanya sebagai *tujuan antara* saja. Oleh karenanya komponen ini pun tidak diteliti.

2. Premis

Berikut adalah beberapa premis yang melandasi pelaksanaan penelitian ini.

- a. Pendidikan dan keterampilan merupakan aset yang tidak ternilai harganya. Pendidikan dapat mengubah status sosial, status ekonomi, dan psikologis seseorang. Menurut Brian Tracy (Rose dan Nicholl, 2002: 17) perbedaan utama antarsetiap orang dalam masyarakat saat ini bukan lagi antara “yang kaya” dan “yang miskin”, tetapi perbedaan utamanya adalah antara “yang kaya pengetahuan” dan “yang miskin pengetahuan”. Bahkan John Sculley (Rose dan Nicholl, 2002: 17) lebih ek-

strim lagi, ia menegaskan bahwa dalam tata ekonomi baru sumber-sumber daya strategis tidak lagi muncul dari dalam tanah, tetapi lahir dari pikiran berupa ide-ide dan informasi, yang tentu saja diperoleh dari pendidikan.

- b. Lembaga kursus dan pelatihan merupakan satuan pendidikan nonformal, diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Pasal 26 ayat 5 UU No. 20 tentang *Sisdiknas*).
- c. Kursus pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat (Kursus Diklusemas) adalah satuan pendidikan luar sekolah yang menyediakan berbagai jenis pengetahuan, keterampilan dan sikap mental bagi warga belajar. Kursus Diklusemas dikelompokkan ke dalam sepuluh rumpun pendidikan yaitu: kerumahtanggaan, kesehatan, keolahragaan, pertanian, kesenian, kerajinan dan industri, teknik dan perambahan, jasa, bahasa, dan khusus. Kursus dilaksanakan oleh dan untuk masyarakat dengan swadaya dan swadana masyarakat. Kursus dan pelatihan dikembangkan melalui sertifikasi dan akreditasi yang bertaraf nasional dan internasional.
- d. Warga belajar atau peserta didik yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pada lembaga kursus adalah warga masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat/jenjang yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, warga belajar tersebut sangat mendambakan pelayanan kursus yang memadai sehingga

setelah tamat mereka mampu mendayagunakan hasil belajar sesuai dengan harapan awalnya.

- e. Instruktur pada lembaga kursus harus memiliki kompetensi kependidikan yang sesuai dengan jenis kursus dan pelatihan yang diselenggarakan. Instruktur harus memiliki kualifikasi akademik dan/atau memiliki sertifikat pengajar pendidikan nonformal. Instruktur juga perlu memiliki pengalaman dan keahlian dibidangnya.
- f. Lembaga kursus harus memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang memadai yang dapat menunjang proses kegiatan belajar membelajarkan sehingga dapat menghasilkan *output* dan *outcome* yang memiliki kemandirian.
- g. Kurikulum merupakan suatu pedoman kegiatan dalam belajar membelajarkan untuk mencapai tujuan pendidikan/pelatihan. Kurikulum kursus sebagian besar ditentukan oleh lembaga penyelenggara kursus. Kurikulum kursus dan pelatihan dikembangkan untuk mencapai: kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja, pengembangan bakat dan minat, serta perkembangan dinamika lokal dan global dengan mengacu pada standar kompetensi nasional dan/atau internasional.
- h. Lembaga kursus harus mendapat izin pendirian yang dikeluarkan oleh pemerintah, dengan mempertimbangkan: (1) kurikulum dan silabus, (2) sarana dan prasarana pendidikan, (3) pendidik dan tenaga kependidikan, (4) sumber pembiayaan pendidikan, (5) sistem evaluasi dan sertifikasi, dan (6) manajemen lembaga.
- i. Pembinaan dan pengembangan lembaga kursus dapat dilakukan melalui kemitraan dengan organisasi lembaga kursus seperti: Himpunan Penyelenggara Kursus Indonesia (HIPKI), dan Himpunan Seluruh

Pendidik dan Penguji Indonesia (HISPPPI); dengan instansi pemerintah dan lembaga swasta; dan dengan dunia usaha dan industri. Organisasi mitra membantu pemerintah dalam membina dan mengembangkan kursus dan pelatihan, meningkatkan mutu tenaga pendidik dan penguji, mengembangkan profesionalisme lulusan kursus.

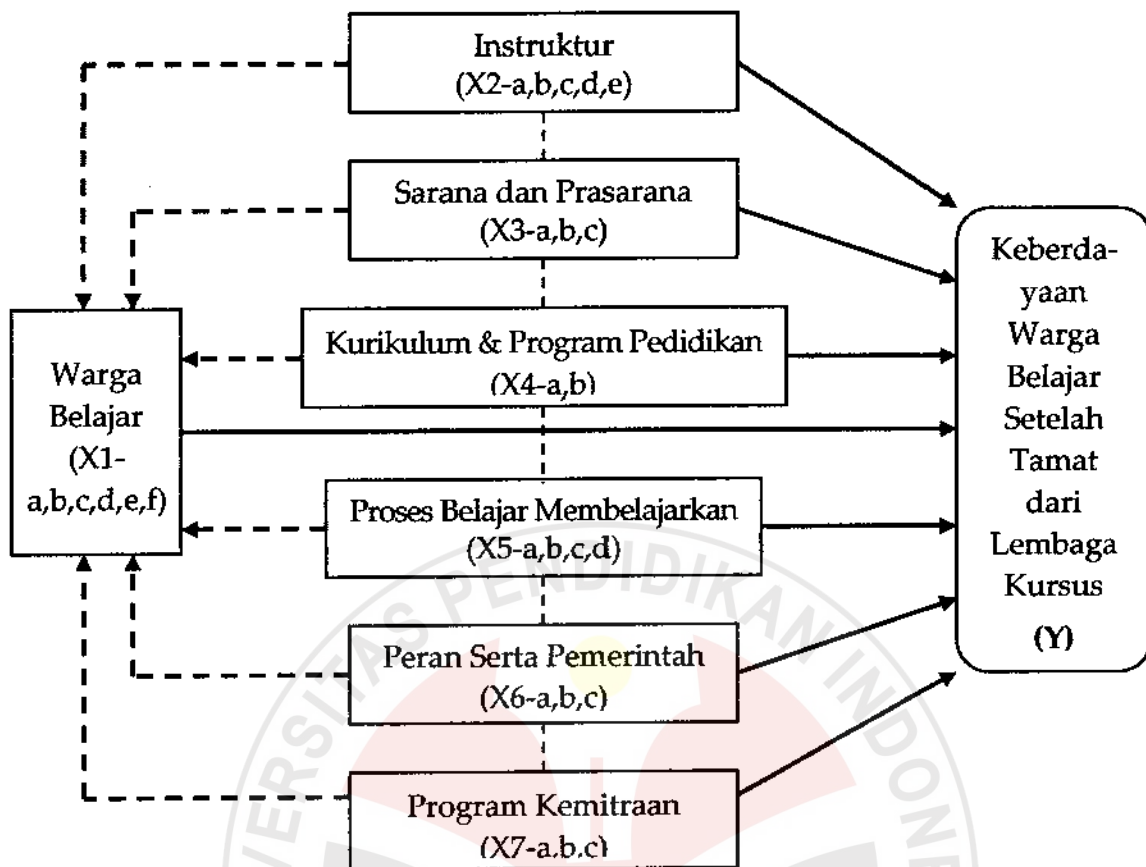
3. Variabel Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap I meneliti tujuh variabel bebas dengan 26 indikator dan satu variabel terikat, sedangkan Tahap II hanya meneliti enam variabel bebas (prediktor) beserta 15 indikatornya yang dihubungkan dengan satu variabel terikat (kriterium).

a. Variabel Penelitian Korelasional (Tahap I)

Terdapat delapan variabel yang terlibat dalam penelitian korelasional ini, tujuh variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas terdiri atas: latar belakang warga belajar (X1), latar belakang instruktur (X2), sarana dan prasarana pendidikan (X3), kurikulum dan program pendidikan (X4), proses belajar membelajarkan, (X5), peran serta pemerintah (X6), dan program kemitraan (X7). Adapun variabel terikat adalah keberdayaan warga belajar (Y) atau kemampuan warga belajar mendayagunakan hasil belajarnya untuk meningkatkan pekerjaan, meningkatkan penghasilan, membantu dan membelajarkan orang lain, meningkatkan jumlah relasi, dan meningkatkan kepercayaan diri.

Gambaran diagramatik model hipotesis hubungan variabel-variabel bebas dengan variabel terikat dituangkan dalam model mental atau paradigma penelitian. Selengkapnya dapat dilihat dalam skema pada Gambar 1.2 berikut ini.



Gambar 1.2 Variabel Penelitian Korelasional

Keterangan:

X1 = Warga Belajar

- a. Usia
- b. Jenis kelamin
- c. Status perkawinan
- d. Pekerjaan
- e. Latar belakang pendidikan & pelatihan
- f. Bakat dan minat

X2 = Instruktur

- a. Latar belakang pendidikan
- b. Pelatihan yang diikuti
- c. Pengalaman mengajar
- d. Latar belakang pekerjaan
- e. Kompetensi

X3 = Sarana dan Prasarana

- a. Gedung dan ruang belajar lembaga kursus
- b. Bahan belajar yang digunakan lembaga kursus
- c. Media pembelajaran lembaga kursus

X4 = Kurikulum dan Program Pendidikan

- a. Jenis dan desain kurikulum yang digunakan lembaga kursus
- b. Program pendidikan yang dijalankan lembaga kursus

X5 = Proses Belajar Membelajarkan

- a. Perencanaan pembelajaran
- b. Proses interaksi pembelajaran
- c. Penilaian pembelajaran
- d. Pengawasan pembelajaran

X6 = Peran Serta Pemerintah

- a. Status perizinan lembaga kursus
- b. Kegiatan pembinaan dari pemerintah
- c. Bantuan dana/sarana yang diperoleh lembaga kursus dari pemerintah

X7 = Program Kemitraan

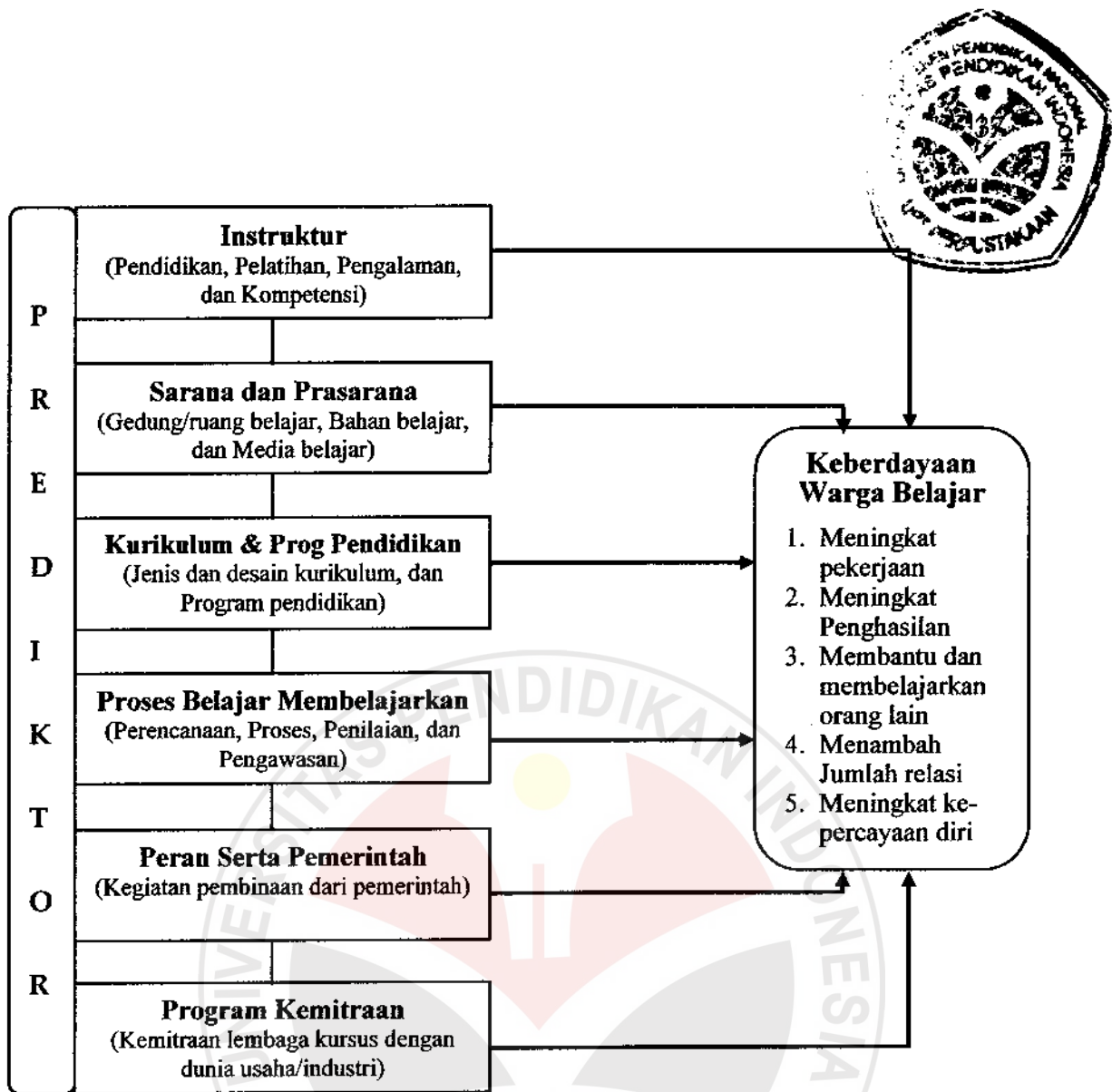
- a. Keanggotaan lembaga kursus dengan organisasi lembaga kursus
- b. Kemitraan lembaga kursus dengan instansi pemerintah/swasta
- c. Kemitraan lembaga kursus dengan dunia usaha/industri

Y = Keberdayaan Warga Belajar dalam: meningkatkan pekerjaan, meningkatkan penghasilan, membantu dan membelajarkan orang lain, menambah jumlah relasi, dan meningkatkan kepercayaan dirinya.

b. Variabel Penelitian Eksperimental (Tahap II)

Penentuan variabel bebas dalam penelitian eksperimental didasarkan atas hasil penelitian korelasional dan pilot studi. Hasil penelitian korelasional menunjukkan bahwa variabel latar belakang warga belajar tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap keberdayaannya setelah tamat. Oleh sebab itu variabel ini tidak dilibatkan dalam penelitian eksperimental. Adapun hasil pilot studi menunjukkan bahwa terdapat beberapa indikator dalam variabel latar belakang instruktur (X2), peran serta pemerintah (X6), dan program kemitraan (X7) mendapat respon negatif dari para ahli dan praktisi. Alasannya, dikhawatirkan peneliti mengalami hambatan dalam menerapkan model terutama dalam mengintervensi pemerintah, pimpinan/pengelola lembaga kursus, dan instruktur lembaga kursus. Untuk itu indikator tersebut tidak diterapkan dalam penelitian eksperimen.

Hal-hal yang mendapat respon negatif terdiri atas lima indikator, yaitu adalah: (1) latar belakang pekerjaan instruktur pada variabel **latar belakang instruktur**; (2) status perizinan lembaga kursus, dan (3) bantuan dana/sarana yang diperoleh lembaga kursus dari pemerintah pada variabel **peran serta pemerintah**; (4) keanggotaan lembaga kursus dengan organisasi lembaga kursus, dan (5) kemitraan lembaga kursus dengan instansi pemerintah/swasta pada variabel **program kemitraan**. Adapun indikator program pendidikan pada variabel **kurikulum dan program pendidikan** terdapat tiga item yang tidak diterapkan dalam eksperimen, yakni sistem evaluasi (mengikutkan warga belajar dalam ujian nasional), memberi kesempatan warga belajar memilih alternatif waktu pembelajaran, dan biaya penyelenggaraan kursus (terjangkau tetapi tidak mengorbankan kualitas). Lebih jelasnya variabel dan indikator yang diteliti pada penelitian eksperimen dapat dilihat pada Gambar 1.3 berikut ini.



Gambar 1.3 Variabel Penelitian Eksperimental

Memperhatikan Gambar 1.3 tersebut terlihat bahwa variabel bebas yang dilibatkan dalam penelitian eksperimental terdiri atas enam variabel yaitu: latar belakang instruktur, sarana dan prasarana pendidikan, kurikulum dan program pendidikan, proses belajar membelajarkan, peran serta pemerintah, dan program kemitraan. Adapun jumlah indikatornya adalah sebanyak 15. Variabel dan indikator inilah yang akan diuji pada eksperimen dalam upaya mengetahui efektivitasnya terhadap keberdayaan warga belajar setelah tamat.

4. Hipotesis Penelitian

Uraian latar belakang, perumusan masalah, dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan sebelumnya telah menggambarkan bahwa variabel-variabel warga belajar, instruktur, sarana dan prasarana pendidikan, proses belajar membelajarkan, kurikulum dan program pendidikan, keterlibatan pemerintah dalam pembinaan lembaga kursus, dan program kemitraan yang dijalankan oleh lembaga kursus berpengaruh/berkontribusi terhadap keberhasilan warga belajar setelah menamatkan kursusnya di lembaga kursus.

Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan sembilan hipotesis dalam format hipotesis kerja sebagai berikut.

- a. Terdapat kontribusi yang signifikan variabel latar belakang warga belajar sebelum mengikuti kursus terhadap keberdayaannya setelah tamat.
- b. Terdapat kontribusi yang signifikan variabel latar belakang instruktur lembaga kursus terhadap keberhasilan warga belajar setelah tamat.
- c. Terdapat kontribusi yang signifikan variabel sarana dan prasarana pendidikan lembaga kursus terhadap keberhasilan warga belajar setelah tamat.
- d. Terdapat kontribusi yang signifikan variabel kurikulum dan program pendidikan yang digunakan lembaga kursus terhadap keberhasilan warga belajar setelah tamat.
- e. Terdapat kontribusi yang signifikan variabel proses belajar membelajarkan di lembaga kursus terhadap keberhasilan warga belajar setelah tamat.

- f. Terdapat kontribusi yang signifikan variabel peran serta pemerintah di lembaga kursus terhadap keberdayaan warga belajar setelah tamat.
- g. Terdapat kontribusi yang signifikan variabel program kemitraan lembaga kursus terhadap keberdayaan warga belajar setelah tamat.
- h. Terdapat kontribusi secara bersama-sama variabel latar belakang warga belajar, latar belakang instruktur, sarana dan prasarana pendidikan, kurikulum dan program pendidikan, proses belajar membelajarkan, peran serta pemerintah, dan program kemitraan lembaga kursus terhadap keberdayaan warga belajar setelah tamat.
- i. Terdapat perbedaan antara kursus yang menggunakan model penyelenggaraan sistem pembelajaran unggulan dengan model konvensional dalam upaya memberdayakan warga belajar setelah tamat.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui prosedur penelitian dan pengembangan (*Research and Development*) versi Borg dan Gall. Menurut Borg dan Gall (1983: 772) tujuan akhir dari penelitian dan pengembangan dalam pendidikan adalah melahirkan produk baru atau perbaikan terhadap produk lama untuk meningkatkan kinerja pendidikan. Dengan demikian, hasil dari penelitian dan pengembangan akan menjadi lebih efektif dan efisien, atau lebih sesuai dengan tuntutan kebutuhan.

Prosedur penelitian ditempuh melalui tiga tahapan pokok kegiatan. Kegiatan penelitian pertama berupa penelitian pendahuluan teoretik di perpustakaan dan empirik di lapangan dengan rancangan korelasional. Selanjutnya, dilakukan pilot studi untuk merancang, memvalidasi, merevisi, dan menguji coba model konseptual. Pada tahap akhir dilakukan uji

empirik dengan melakukan penelitian eksperimental. Eksperimen dilakukan dengan menggunakan rancangan *quasi-experimental model nonequivalent groups pretest-posttest design* (McMillan dan Schumacher, 2001: 342).

Penelitian dilaksanakan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Pengambilan sampel untuk penelitian korelasional menggunakan *purposive random sampling*, yaitu dengan mengambil seluruh lembaga kursus yang menyelenggarakan kursus komputer *Paket Aplikasi Perkantoran*. Dengan teknik tersebut diperoleh sampel sebanyak 31 lembaga kursus, 31 pimpinan kursus, 31 instruktur, dan 117 warga belajar yang telah tamat. Unit analisisnya menggunakan lembaga kursus. Adapun penarikan sampel dalam penelitian eksperimental juga menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan langsung menetapkan dua lembaga kursus yang dianggap memenuhi syarat. Satu lembaga kursus sebagai kelompok eksperimen yang akan menjadi partisipan penelitian guna mengujicobakan model yang telah dirancang, dan satunya lagi sebagai kelompok kontrol.

Data-data yang terkumpul melalui penelitian korelasional dan eksperimental dianalisis secara deskriptif dan inferensial. Untuk membuktikan apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak maka data penelitian dianalisis dengan teknik statistik korelasi, regresi, dan *t-test*. Analisis korelasi dan regresi digunakan pada penelitian korelasional, sedangkan data-data penelitian eksperimental dianalisis dengan *t-test*.